



LKj |

KASUBAG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN OTODA

LAPORAN KINERJA TRIBULAN I

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TAHUN 2020



BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan I tahun anggaran 2020. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 7 ayat (1) telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;



4. Menghimpun dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
5. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Otonomi Daerah;
6. Melaksanakan penataan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi izin dan cuti, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati;
9. Melaksanakan fasilitasi dan dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pengangkatan, pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam laporan kinerja individu;
12. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai dengan sub bagian tugasnya.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Otonomi Daerah	Jumlah peringatan Otoda yang terfasilitasi	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kecamatan yang dibina tentang PATEN	21 Kec
3.	Terfasilitasinya penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD	52 OPD

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2020, maka dari 3 indikator kinerja tersebut yang telah tercapai adalah 2 target, yakni Jumlah kecamatan yang dibina tentang PATEN dan Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD. Adapun indikator kinerja " Jumlah peringatan Otoda yang terfasilitasi "belum dapat tercapai karena strategi pencapaian target dimaksud baru diimplementasikan pada tribulan II dan tribulan IV tahun anggaran 2020.



Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Otonomi Daerah	Jumlah peringatan Otoda yang terfasilitasi	2 Kegiatan	0	0%
2.	Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kecamatan yang dibina tentang PATEN	21 Kec	21 kec	100%
3.	Terfasilitasinya penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD	52 OPD	52 OPD	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.



Tabel 2.3

Cost per outcome Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020 - Tribulan I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Otonomi Daerah	Jumlah peringatn Otoda yang terfasilitasi	27.600.000	0	0%	2 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
2.	Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kecamatan yang dibina tentang PATEN	44.250.000	12.260.000	27.70%	21 kec	21 kec	100%	72.3%
3.	Terfasilitasinya penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD	106.940.000	10.051.000	9.40%	52 OPD	52 OPD	100%	90.6%



Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran untuk peringatan otoda yaitu 0%, efisiensi Kecamatan yang dibina tentang PATEN yaitu 72.3% dan efisiensi capaian kinerja Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD yaitu 90.6%. Efisiensi tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di tribulan I Tahun Anggaran 2020, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tribulan I tahun anggaran 2020, sudah sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah penyerapan anggaran kegiatannya. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Jumlah peringatan Otoda yang terfasilitasi	a. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait tentang persiapan pelaksanaan Upacara Hari Otonomi Daerah dan Hari Jadi Provinsi	Dilakukan Bulan April dan Oktober tahun 2020
2.	Jumlah Kecamatan yang dibina tentang PATEN	a. Melaksanakan pembinaan PATEN kepada kecamatan b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelegaraan PATEN di kecamatan	Dilakukan Bulan Februari Tahun 2020 Monev dilaksanakan bulan Juni, Agustus, Oktober tahun 2020
3.	Jumlah OPD yang dibina penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD	a. Melaksanakan desk LPPD kepada OPD se Kabupaten Lumajang	Dilakukan Bulan Januari Februari Maret Tahun 2020



2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. melakukan koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan data LPPD sebagai persiapan evaluasi di tingkat Provinsi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-



BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, 3 target kinerja yang ditetapkan, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Ketidakterwujudan target kinerja adalah karena memang belum memasuki jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah melalui :
 - a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan data-data LPPD untuk persiapan evaluasi di tingkat Provinsi;
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait tentang persiapan pelaksanaan Upacara Hari Otonomi Daerah dan Hari Jadi Provinsi.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan

ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19870404 200701 1 002

Lumajang, 31 Maret 2020

Kasubag. Administrasi Pemerintahan
dan Otonomi Daerah

ENNY ROSEITA HADI, S.IP
NIP. 19910412 201206 2 001